

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia. Penelitian dilakukan khusus Bank Umum Syariah dengan jumlah sampel sebanyak 13 bank syariah yang lolos seleksi sampel. Pengolahan data menggunakan program SPSS 23.

#### 4.1 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi umum tentang data dari sampel yang dijadikan penelitian. Informasi umum mengenai data penelitian ini menggunakan mean, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Variabel penelitian ini adalah Kepemilikan Intitusional, Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pengungkapan Risiko Operasional.

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ORD	65	.53	.87	.7102	.08908
KPI	65	.60	1.00	.9582	.09533
KAI	65	.29	1.00	.6163	.14077
DKI	65	.00	1.00	.6215	.16876
DPS	65	.60	1.00	.8708	.12465
SIZE	65	14.06	18.44	16.3666	1.28938
ROA	65	-.81	.07	-.0103	.10776
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Dari hasil analisis deskriptif statistik diatas dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan tabel 4.1 hasil analisis deskriptif variabel indeks pengungkapan risiko operasional (ORD) menunjukkan rata-rata sebesar 0.7102 yang berarti rata-rata perusahaan perbankan dalam pengungkapan risiko operasional sekitar 71%, dengan standar deviasi 0.089 yang menunjukkan indeks pengungkapan risiko operasional cenderung homogen, karena lebih kecil daripada nilai rata-rata. Dari data sekunder laporan tahunan 13 bank umum syariah periode 2014-2018, Bank Victoria Syariah hanya mengungkapkan 24 item pengungkapan risiko operasional atau 53%. Sedangkan BNI Syariah memberikan pengungkapan lebih luas dengan jumlah 39 item pengungkapan atau 87% dari total 45 item pengungkapan di laporan tahunannya.

Hasil analisis deskriptif variabel Kepemilikan Institusional (KPI) perbankan yang menjadi sampel penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 0.9582 yang berarti rata-rata kepemilikan institusional perbankan syariah Indonesia sebesar 95,82%. Standar deviasi sebesar 0.0953 yang menunjukkan penyebaran kepemilikan institusional perbankan syariah Indonesia cenderung homogen.

Hasil analisis deskriptif variabel independensi kedua yaitu, Komite Audit Independen (KAI) memiliki rata-rata sebesar 0.6163 yang berarti rata-rata keberadaan komite audit independen di perbankan syariah hanya 61,63% dari total keseluruhan anggota komite audit. Standar deviasi sebesar 0.1407 yang menunjukkan penyebaran jumlah komite audit independen di perbankan syariah Indonesia cenderung homogen. Perbankan dalam penelitian ini memiliki paling sedikit 1 komite audit independen dan paling banyak 4 komite audit independen.

Hasil analisis deskriptif variabel independensi ketiga yaitu Dewan Komisaris Independen (DKI) memiliki rata-rata sebesar 0.6215 yang berarti rata-

rata perbankan syariah Indonesia memiliki dewan komisaris independen 62,15% dari seluruh dewan komisaris yang ada. Standar deviasi sebesar 0.1687 yang menunjukkan ukuran penyebaran dewan komisaris independen cenderung homogen, karena nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata.

Hasil analisis deskriptif variabel independensi terakhir, yaitu karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki rata-rata sebesar 0.8708 yang berarti sebanyak 87,08% komponen dari karakteristik DPS sudah baik dengan melihat komponen pengukuran DPS yaitu keberadaan anggota, jumlah, *cross membership*, latar belakang pendidikan dan pengalaman. Standar deviasi sebesar 0.1246 yang menunjukkan karakteristik DPS cenderung homogen.

## 4.2 Uji Asumsi Klasik

### 4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018) Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1-sample K-S), dengan menggunakan tingkat signifikansi pengujian ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0.05.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07030586
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.060
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Besarnya nilai Asymp, Sig. (2-tailed) adalah 0.200 dimana lebih besar dari 0.05, maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal, sehingga sampel penelitian memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

#### 4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel independen dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* 0.10 dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2018). Berdasarkan output SPSS versi 23 dapat ditunjukkan besarnya VIF dan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen. Hasil tersebut dapat terlihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.182	.226		-.804	.425		
	KPI	.236	.111	.253	2.122	.038	.756	1.322
	KAI	-.022	.072	-.035	-.309	.759	.819	1.221
	DKI	-.054	.057	-.102	-.941	.351	.918	1.089
	DPS	-.030	.087	-.042	-.345	.731	.732	1.367
	SIZE	.045	.010	.653	4.744	.000	.566	1.767
	ROA	.013	.090	.016	.149	.882	.914	1.094

a. Dependent Variable: ORD

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Hasil uji multikolinieritas terdapat pada tabel 4.3 yang menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih besar dari

95%. Hasil perhitungan untuk *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan nilai VIF variabel independen tidak lebih dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas yang terjadi antar variabel independen dalam model regresi.

#### 4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk menguji heterokedastisitas dengan cara melakukan regresi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dasar pengambilan keputusan uji heterokedastisitas (Glejser), nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.021	.130		-.161	.873
	KPI	.029	.064	.067	.452	.653
	KAI	.037	.042	.124	.877	.384
	DKI	.025	.033	.101	.757	.452
	DPS	-.005	.050	-.015	-.102	.919
	SIZE	.001	.005	.031	.181	.857
	ROA	.032	.052	.083	.622	.537

a. Dependent Variable: abs\_res1

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Dari output di tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi keempat variabel independen yaitu Kepemilikan Institusional, Komite Audit Independen,

Dewan Komisaris Independen dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah  $> 0.05$ , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

#### 4.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah gejala terjadinya korelasi diantara kesalahan pengganggu dari suatu observasi lainnya, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson. Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi berdasarkan nilai tabel Durbin Watson DL (bagian bawah) dan DU (bagian atas) yang dapat ditunjukkan seperti tabel 4.5 dibawah.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.614 <sup>a</sup>	.377	.313	.07385	2.092
a. Predictors: (Constant), ROA, DKI, DPS, KPI, KAI, SIZE					
b. Dependent Variable: ORD					

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Berdasarkan hasil olah data regresi diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,092, sedangkan dari perhitungan manual nilai DL = 1,4378 dan DU = 1,7673. Karena nilai DW (2,092)  $>$  DU (1,7673) maka tidak terdapat autokorelasi positif dan nilai 4-DW (2,5622)  $>$  DU (1,7673) maka juga tidak terdapat autokorelasi negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian ini menyatakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

### 4.3 Hasil Pengujian Regresi

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen. Selanjutnya untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini maka akan dilanjutkan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.182	.226		-.804	.425
	KPI	.236	.111	.253	2.122	.038
	KAI	-.022	.072	-.035	-.309	.759
	DKI	-.054	.057	-.102	-.941	.351
	DPS	-.030	.087	-.042	-.345	.731
	SIZE	.045	.010	.653	4.744	.000
	ROA	.013	.090	.016	.149	.882

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Dari tabel 4.6 maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,182 + 0,236\mathbf{KPI} - 0,022\mathbf{KAI} - 0,054\mathbf{DKI} - 0,030\mathbf{DPS} + 0,045\mathbf{SIZE} + 0,013\mathbf{ROA}$$

Berdasarkan persamaan hasil regresi linier berganda diatas, maka nilai konstan sebesar -0,182 yang artinya bahwa ketika Kepemilikan Institusional, Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dianggap konstan, maka jumlah pengungkapan risiko operasional akan menurun sebesar 0,182.

#### 4.3.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.614 <sup>a</sup>	.377	.313	.07385

a. Predictors: (Constant), ROA, DKI, DPS, KPI, KAI, SIZE

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat menginformasikan baik tidaknya model regresi yang terestimasi. Berdasarkan hasil regresi terlihat pada tabel 4.7, nilai  $R^2$  sebesar 0,377 yang menunjukkan bahwa model yang dibangun sudah baik. Pada model regresi berganda penggunaan *Adjusted R<sup>2</sup>* lebih baik dalam melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen bila dibandingkan dengan  $R^2$ . Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.313 mengindikasikan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas mampu menerangkan 31,3% pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia, sementara sisanya sebesar 68,7% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdeteksi dalam model ini.

#### 4.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Nilai F sebesar 5,853 yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 4, maka  $H_0$  yang menyatakan variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil



regresi menunjukkan signifikansi F sebesar 0,000 yang berarti signifikan kuat sehingga model yang diajukan dapat dikatakan berkualitas baik.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.192	6	.032	5.853	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.316	58	.005		
	Total	.508	64			
a. Dependent Variable: ORD						
b. Predictors: (Constant), ROA, DKI, DPS, KPI, KAI, SIZE						

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

#### 4.3.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian uji hipotesis secara parsial dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t, dengan tingkat signifikansi 5%. Uji t digunakan untuk membuktikan hipotesis satu (H<sub>1</sub>) sampai hipotesis empat (H<sub>4</sub>). Hasil dari perbandingan probabilitas (sig.t) dengan taraf signifikan 0,05 akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Tabel 4.6 menunjukkan hasil persamaan regresi pada variabel-variabel penelitian yang memperlihatkan hasil dari  $t_{hitung}$  yang dikeluarkan oleh output olah data dengan menggunakan SPSS 23.

**Tabel 4.9**  
**Uji t**

Variabel	T hitung	Sig. t	Hasil Uji t	Keterangan
KPI	2,122	0,038	Signifikan	H1 diterima
KAI	-0,309	0,759	Tidak signifikan	H2 ditolak
DKI	-0,941	0,351	Tidak signifikan	H3 ditolak
DPS	-0,345	0,731	Tidak signifikan	H4 ditolak
SIZE	4,744	0,000	Signifikan	
ROA	0,149	0,882	Tidak signifikan	

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

## **4.4 Pembahasan Variabel Independen**

### **4.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**

Berdasarkan perhitungan statistik diketahui bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko operasional sebesar  $t_{hitung}$  2,122 dan nilai probabilitas 0,038 maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh, signifikan dan searah antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia. Semakin tinggi kepemilikan institusional pada bank umum syariah maka semakin tinggi pengungkapan informasi risiko operasional dalam laporan tahunan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Teori keagenan menerangkan bahwa kepemilikan institusional yang lebih besar memiliki insentif ekstra untuk memonitor kebijakan pengungkapan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya merugikan pemilik perusahaan. Investor institusional memiliki pengalaman dan sumber daya yang memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap keputusan manajer termasuk keputusan terkait pengungkapan. Peran kepemilikan institusional ini akan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi, termasuk informasi tentang risiko operasional.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan.

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor, sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan. Mayoritas kepemilikan saham bank umum syariah di Indonesia adalah pihak institusional, sehingga pengendalian dan kekuasaan bank syariah berada di tangan investor institusi. Konsentrasi kepemilikan dalam bank-bank syariah dapat menggantikan kontrol yang dilakukan oleh pihak dewan dan komite. Peningkatan pengungkapan informasi tentang risiko operasional, bank dapat meningkatkan daya tarik pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen bank dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mengkomunikasikan lebih banyak informasi tentang manajemen risiko khususnya risiko operasional.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan bahwa peningkatan jumlah pemegang saham institusional dapat menentukan tingkat pengungkapan informasi perusahaan dan persyaratan untuk akses yang lebih luas ke informasi lain perusahaan. Perhatian yang lebih besar diberikan kepada manajemen oleh investor institusional dimana secara tidak langsung memberikan tekanan yang berdampak pada kualitas pengungkapan manajemen risiko (Ashfaq et al., 2016). Hasil ini konsisten dengan penelitian Al-maghzom et al. (2016); Neifar dan Jarboui (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.

#### **4.4.2 Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**

Berdasarkan perhitungan statistik diketahui bahwa pengaruh komite audit independen terhadap pengungkapan risiko operasional sebesar  $t_{hitung} -0,309$  dan nilai probabilitas 0,759 maka  $H_0$  tidak ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Komite Audit Independen terhadap pengungkapan risiko operasional. Hal ini berarti manajer melakukan pengungkapan risiko operasional di laporan tahunan tidak disebabkan oleh adanya Komite Audit Independen.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit bertanggungjawab merekomendasikan penunjukan auditor eksternal, mengawasi proses audit, manajemen dan audit internal, serta memastikan kredibilitas pelaporan keuangan. Komite audit yang lebih besar dapat memberikan pemantauan yang lebih kuat, yang mengarah ke tingkat transparansi yang lebih tinggi (Abdallah et al., 2015). Penelitian ini melihat ukuran komite audit yang dilihat dari jumlah anggota komite audit independen, karena komite audit yang independen dapat membantu dewan komisaris dalam memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (IBI, 2016). Selain itu, reputasi baik komite audit independen mendukung transparansi, yang mana mendorong manajemen dalam memberikan informasi lebih dari yang diwajibkan terutama pengungkapan risiko operasional di bank syariah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa banyak sedikitnya Komite Audit Independen tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan manajer bank umum syariah dalam mengungkapkan item-item informasi risiko operasional dalam laporan tahunan. Hal ini dimungkinkan bahwa jumlah komite audit independen hanya untuk mematuhi syarat dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa anggota komite audit paling kurang terdiri dari tiga orang dimana dua diantaranya adalah pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan perbankan syariah.

Penelitian Al-maghzom et al. (2016); Alkurdi et al. (2019); dan Ashfaq et al. (2016) menyatakan hasil yang berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan ini disebabkan oleh proksi komite audit yang digunakan adalah jumlah rapat yang dilaksanakan, kemudian melihat pengaruh terhadap pengungkapan informasi risiko secara keseluruhan. Penelitian pengaruh pengungkapan risiko operasional dengan variabel komite audit independen telah dilakukan dengan proksi lain dan hasilnya menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan. Selain itu, adanya peraturan yang mengatur tentang pengungkapan manajemen risiko membuat manajer hanya memenuhi pengungkapan wajib sesuai peraturan dari OJK terkait risiko operasional. Maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengeluarkan variabel komite audit independen dari model.

#### **4.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**

Berdasarkan perhitungan statistik diketahui bahwa pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan risiko operasional sebesar  $t_{hitung} -$

0,941 dan nilai probabilitas 0,351 maka  $H_0$  tidak ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan risiko operasional. Hal ini berarti bahwa manajer melakukan pengungkapan risiko operasional di laporan tahunan tidak disebabkan oleh adanya dewan komisaris independen.

Salah satu karakteristik tata kelola perusahaan yang harus dimiliki perusahaan yaitu komisaris independen yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank telah melakukan praktik-praktik akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, pengungkapan, kemandirian dan praktik keadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan bank (IBI, 2016). Berdasarkan teori keagenan, proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris dapat memenuhi peran dalam memberikan pengawasan yang ketat dan pengendalian pada perilaku oportunistik (kecurangan) manajer yang mungkin terjadi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa banyak sedikitnya Dewan Komisaris Independen tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan manajer bank umum syariah dalam mengungkapkan item-item informasi risiko operasional dalam laporan tahunan. Pengangkatan komisaris independen di bank umum syariah Indonesia kemungkinan hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi semata dan tidak ditunjukkan terciptanya penguatan tata kelola perusahaan yang baik. Selain

itu, melihat dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa dewan komisaris memastikan direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern. Atau dengan kata lain tidak memiliki keterlibatan langsung dalam mempengaruhi keputusan pemenuhan pengungkapan informasi risiko operasional. Hanya melaksanakan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam memenuhi pengungkapan sesuai peraturan yang ada tanpa memperluas pengungkapan lain yang berhubungan dengan risiko operasional.

Penelitian Alkurdi et al. (2019) menyatakan hasil yang berbeda dengan penelitian ini, yaitu dewan komisaris independen mempunyai hubungan positif terhadap pengungkapan wajib dan sukarela informasi risiko. Hasil ini tidak konsisten karena penelitian tersebut menggunakan variabel dependen pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela, sehingga terdapat hasil yang bias.

#### **4.4.4 Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional**

Berdasarkan perhitungan statistik diketahui bahwa pengaruh kriteria dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan risiko operasional sebesar  $t_{hitung} -0,345$  dan nilai probabilitas 0,731 maka  $H_0$  tidak ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan risiko operasional. Hal ini berarti bahwa manajer melakukan

pengungkapan risiko operasional di laporan tahunan tidak disebabkan oleh keberadaan dewan pengawas syariah.

Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja bank syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah definisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan peran DPS adalah menasihati, mengawasi dan memastikan operasional perusahaan agar patuh pada prinsip-prinsip syariah. Direksi bertindak atas nama pemegang saham yang memiliki tugas memantau dan mengawasi keseluruhan kegiatan bisnis, sementara manajer memiliki kewajiban fidusia untuk mengelola perusahaan sebagai kepercayaan atas nama semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham. Anggota syariah yang dimiliki oleh setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia paling sedikit berjumlah dua orang dan paling banyak berjumlah tiga orang. Dewan pengawas harus dapat memahami ketentuan Fiqih Islam sebagai sumber hukum Islam serta memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi dasar hukum operasional bank syariah. Anggota DPS idealnya berpengetahuan luas dalam hukum Islam, bidang perbankan dan akuntansi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Karakteristik Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan manajer bank umum syariah dalam mengungkapkan item-item informasi risiko operasional dalam laporan tahunan. Melihat dari laporan DPS perbankan syariah Indonesia dari rapat yang dilaksanakan berisikan agenda diskusi, konsultasi tentang pemenuhan prinsip syariah, pengawasan pengembangan produk baru, dan pengawasan fatwa yang



diterbitkan oleh DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan karakteristik DPS dengan melihat beberapa faktor yang terdiri dari keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, *cross membership*, latar belakang pendidikan serta pengalaman atau reputasi (Farook & Lanis, 2007). Sedangkan penelitian Elamer et al. (2019); Neifar dan Jarboui (2018) menyatakan bahwa kehadiran DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko bank-bank Islam. Selain perbedaan proksi yang dipakai kemungkinan karakteristik DPS di perbankan syariah Indonesia masih belum memberikan dampak langsung dalam memenuhi tujuan tata kelola internal, yaitu transparansi informasi. Fungsi DPS masih terbatas hanya bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

#### **4.4.5 Pembahasan Variabel Kontrol**

##### **a. Ukuran Perusahaan**

Berdasarkan tabel 4.9 dengan hasil perhitungan statistik diketahui  $t_{hitung}$  ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 4,744 dan nilai probabilitas 0,000 maka  $H_0$  ditolak. Hal ini mengartikan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional. Artinya, semakin besar ukuran bank umum syariah maka semakin banyak pengungkapan item-item pengungkapan risiko operasional dalam laporan tahunan. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki tuntutan untuk mengungkapkan risiko dengan detail sebagai bentuk memenuhi *public demand* atas pengungkapan yang lebih luas tentang risiko-risiko yang dihadapi terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas.

## **b. Profitabilitas**

Berdasarkan tabel 4.9 dengan hasil perhitungan statistik diketahui  $t_{hitung}$  profitabilitas (ROA) sebesar 0,149 dan nilai probabilitas 0,882 maka  $H_0$  tidak ditolak. Hal ini mengartikan profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional. Artinya, manajer melakukan pengungkapan risiko operasional di laporan tahunan tidak disebabkan oleh besarnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup dan menunjukkan prospek yang akan datang. Adapun perusahaan perbankan yang memiliki profit tinggi telah mendapatkan banyak kepercayaan masyarakat tanpa melihat seberapa besar informasi terkait pengungkapan risiko operasional yang disajikan.